



denpasar
the heart of bali



RENJA

2026

**DINAS PERIKANAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KOTA DENPASAR**

Jl. MATARAM NO.1



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);

9. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah secara berkala atas pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota setiap triwulan melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 September 2025


WALIKOTA DENPASAR,
I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 2 September 2025


SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,
IDA BAGUS ALIT WIRADANA
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA DENPASAR TAHUN 2026

1. RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
2. RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
3. RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2026
4. RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
5. RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
6. RENCANA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
7. RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
8. RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2026
9. RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2026
10. RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
11. RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
12. RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2026
13. RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
14. RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
15. RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2026
16. RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
17. RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2026
18. RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
19. RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
20. RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
21. RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
22. RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
23. RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
24. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
25. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2026

26. RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
27. RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
28. RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
29. RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
30. RENCANA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
31. RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TAHUN 2026
32. RENCANA KERJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2026
33. RENCANA KERJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2026
34. RENCANA KERJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
35. RENCANA KERJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
36. RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Renja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar tahun 2026 telah berhasil disusun. Renja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan yang disusun merupakan terjemahan dari PERUBAHAN RENSTRA Dinas periode 2021 -2026 sebagai penjabaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Dinas disusun tetap mengacu pada RPJMD yang telah diuraikan sampai kegiatan dalam RENSTRA Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dan merupakan kerja Tim penyusun Renja Dinas yang telah ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.

Renja Dinas dipakai sebagai pedoman untuk bidang dan UPTD dalam menyusun RKA kegiatan masing-masing bidang dan UPTD tahun 2026

Demikian Renja ini kami susun sebagai bahan acuan dalam penjabaran Program dan kegiatan, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja ini.

Denpasar, 2 September 2025

Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan



drb. Ida Bagus Mayon Suryawangsa
Perencana Utama Muda
NIP. 19660328 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1.LATAR BELAKANG	1
1.2.LANDASAN HUKUM	2
1.3.MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4.SISTEMATIKA	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD	6
2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN DINAS PERIKANAN KETAHANAN PANGAN	9
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN.....	11
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	13
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	14
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	15
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA	16
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	17
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	18
BAB V. PENUTUP	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD. Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rencana program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun.

Rancangan Renja Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun terakhir RPJM Daerah Tahun 2021-2026 dan sebagai tindak lanjut dari RKPD Tahun 2026 serta Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar tahun 2021 Nomor 5), hasil kerja pembangunan tahun lalu dan laporan Renstra SKPD, isu strategis yang akan dicapai pada tahun pelaksanaan rencana kerja serta mempertimbangkan kebijakan program pembangunan Pusat dan Provinsi bidang Perikanan dan Ketahanan Pangan.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar merupakan rencana kegiatan untuk periode satu tahun pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar yaitu: ***Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju.***

Dalam pencapaian Visi tersebut maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) didasarkan Misi Pembangunan Kota Denpasar yaitu:

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan.
2. ***Menjaga Stabilitas Keamanan dengan terkontrolnya Kamtibmas, Ketahanan Pangan dan Kesiapsiagaan Bencana.***
3. Kejujuran dan Spirit Sewaka darma sebagai penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju tata Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali.

Mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar dimaksud, maka Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar terkait dalam pencapaian Misi ke 2, yaitu: Menjaga Stabilitas Keamanan dengan terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan pangan dan Kesiapsiagaan Bencana.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871); 1-3
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 7);
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor);

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja – SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Program / Kegiatan dan pendanaannya dalam satu tahun anggaran 2025 secara terpadu, terarah dan terukur. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keterpaduan antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2026 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD TahunLalu dan Capain Renstra DPKP

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPKP

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPKP,

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPKP

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPKP

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPKP Tahun 2024 dan Capaian Renstra DPKP.

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 terdiri dari 7 Program, 15 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan. Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar mendapatkan alokasi Anggaran dari APBD Kota Denpasar dan APBN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.518.427.264,-. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 adalah sebesar Rp. 10.032.628.264,- (Penyerapan Anggaran sebesar 69,10% dengan Realisasi Fisik sebesar 80,48 dari target 100%).

Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat.
 - 1.1. Penyediaan dan penyaluran pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan.
 - 1.1.1. Peningkatan Ketahanan Pangan
 - 1.1.2. Pengembangan kelembagaan distribusi pangan Kabupaten/Kota
 - 1.1.3. Penyediaan Informasi harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
 - 1.1.4. Koordinasi dan Sinkronisasi pemantauan stok, Pasokan dan Harga pangan Pokok Strategis.
 - 1.2. Pelaksanaan Pencapaian target konsumsi pangan perkapita / tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi
 - 1.2.1. Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita pertahun
 - 1.2.2. Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal
 - 1.2.3. Koordinasi dan Sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi perkapita pertahun.
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - 2.1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
 - 2.1.1. Penyusunan Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
 - 2.2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota
 - 2.1.1. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota

3. Program Pengawasan Keamanan pangan
 - 3.1. Pelaksanaan Pengawasan keamanan pangan Segar Daerah kabupaten / Kota
 - 3.1.1. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/Kota.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 4.1.1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
 - 4.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.2.1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4.2.2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.3. Pengadaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - 4.3.1. Pengadaan Mebel
 - 4.3.2. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - 4.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 4.4.1. Penyediaan jasa Surat Menyurat
 - 4.4.2. Penyediaan jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik
 - 4.4.3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - 4.4.4. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - 4.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 4.5.1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 4.5.2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - 4.5.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - 5.1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1.1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.
 - 5.1.2. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil
6. Program Pengelolaan Budidaya Perikanan
 - 6.1. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil.
 - 6.1.1. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil.
 - 6.2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - 6.2.1. Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.
 - 6.2.2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota.

7. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

7.1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

7.1.1. Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.

7.2. Penyediaan dan Penyaluran bahan baku industri pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

7.2.1. Peningkatan Ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

7.2.2. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja berdasarkan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024, adalah sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai bulan Oktober 2024:

1. Program Penanganan Kerawanan Pangan, Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan, (a). Sub Kegiatan Pelaksanaan, pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten Kota, untuk belanja kemasan dan distribusi CPPD belum bisa direalisasikan karena belum ada penyaluran CPPD ke masyarakat yang membutuhkan. Dana kembali ke kas daerah,
2. Program Pengawasan Keamanan pangan, Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan pangan Segar daerah Kab/Kota, pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana pengujian dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah Kab/Kota belum memenuhi target kinerja dimana pengadaan obat untuk alat uji belum realisasi karena tidak ada penyedia pembedin.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang direncanakan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota semua kegiatan dan sub kegiatan capaian indikator sesuai dengan target yang direncanakan.
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan capaian sesuai dengan yang ditargetkan.
3. Program Pengawasan Keamanan pangan dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub Kegiatan, capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang dipasang.
4. Program Pengelolaan perikanan tangkap dengan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang dipasang.

5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dengan 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, indikator kinerja sesuai dengan target yang rencanakan.
 6. Program Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan dengan 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, capaian indikator indikator kinerja sesuai dengan target yang dipasang.
- c. Realisasi Program yang melebihi capaian 100%. Samoai bulan Oktober tahun 2024 tidak ada program yang melewati capaian 100%.
 - d. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya atau melebihi target kinerja. Pada Tahun 2024 : Dalam pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub kegiatan tahun 2024, dapat direalisasikan meskipun ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan mundur sesuai dengan kondisi lapangan. Untuk kegiatan yang dilaksanakan mundur dari jadwal yang telah ditentukan dilaksanakan pergeseran anggaran kas dengan bersurat ke TAPD Kota Denpasar c.q Kepala BPKAD Kota Denpasar.
 - e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD
 - Perubahan aturan yang timbul pada pertengahan perjalanan pelaksanaan kegiatan mempengaruhi capaian program renstra SKPD dimana ada beberapa indikator mengalami perubahan atau penyesuaian.
 - f. Kebijakan/Tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut mempengaruhi capaian program renstra SKPD.
 - Perencanaan Renja, Renstra dan RPJMD dibuat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersediadan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - Perencanaan Renja, Renstra dan RPJMD dibuat melalui sinergisitas, koordinasi SKPD dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Untuk Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Renstra disajikan dalam bentuk tabel pada Tabel 2.1 di bawah ini :

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar menetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) Sasaran dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan juga Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan target dan capaian seperti yang dicantumkan pada table 2.2 dan 2.3 dibawah ini :

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja Program(oucome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2025 (n-1)	Realisasi Target Kinerja hsl Program dan keluaran Kegiatan s/d th (n-3)(2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun (n-1) (2025)	Perkiraan realisasi capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target renja PD (n-2)	Realisasi renja PD (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) (2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+8)	11=(10/4)
		Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan (unit)	2	-	2	-	-	2	-	
2.09.03	2.04	Pelaksanaan Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi								
		Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam (B25A) (desa kelurahan)	35	25	30,0	30,0	100	35	35,0	100
	2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi pangan Per Kapita per Tahun								
		Target konsumsi pangan perkapita pertahun (dokumen)	1	1	1	1	100	1	3,0	300
	2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								
		Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan lokal (laporan)	1	1	1	1	100	1	1	300
2.09.04		Program Penanganan Kerawanan pangan								
		Persentase cadangan pangan (%)	80	35	70	70	100	80	35	44
2.09.04	2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan								
		Tersusunnya peta daerah ketahanan dan kerentanan pangan (dokumen)	6	6	1	1	100	6	6	100
	2.01.01	Penyusunan, Pemutahiran, dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan								
		Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang disinkronkan (dokumen)	6	6	1	1	100	6	6	100
2.09.04	2.02	Penanganan Kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota								
		Pemantauan daerah rawan pangan (Kecamatan)	4	4	4	4	100	4	4	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPO Tahun 2025 (n-1)	Realisasi Target Kinerja Ind Program dan keluaran Kegiatan s/d th (n-3)(2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Laju 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun (n-1) (2025)	Perkiraan realisasi capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target renja PD (n-2)	Realisasi renja PD (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) (2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3 25 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah									
		Jumlah pemenuhan gaji dan tunjangan pegawai (bulan)	14	14	14	14	100,00	14	14	100
	2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang)	47	45	45	43	95,56	47	40	85
	2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (dokumen)	1	1	1	1	100,00	1	1	100
3 25 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
		Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
	2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			-	-	-			
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	3	3	3	3	100	3	3	100
	2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan								
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	1	1	1	1	100	1	1	100
3 25 01 2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah									
		Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	13	4	12	9	75	13	26	200
	2.07.05	Pengadaan Mebel								
		Jumlah paket mebel yang di sediakan (unit)	10	1	8	20	250	10	-	-
	2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya								
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan(unit)	5	12	5	15	300	5	-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja Program[oucome]/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2025 (n-1)	Realisasi Target Kinerja hal Program dan keluaran Kegiatan s/d th (n-3)(2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun (n-1) (2025)	Perkiraan realisasi capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target renja PD (n-2)	Realisasi renja PD (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) (2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+8)	11=(10/8)
3 25 01 2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
		Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
	2.08.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat								
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	1	1	1	1	100	1	1	100
	2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik								
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik yang disediakan (laporan)	1	1	1	1	100	1	1	100
	2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor								
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (laporan)	1	1	1	1	100	1	1	100
	2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor								
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	1	1	1	1	100	1	1	100
3 25 01 2.09	Pemeliharaan barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah									
		Persentase barang milik daerah yang terawat (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
	2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan								
		Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	22	20	22	20	91	22	20	91
	2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya								
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara(unit)	56	56	56	56	100	56	56	100

Kode Beking	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2025 (n-1)	Realisasi Target Kinerja hsl Program dan keluaran Kegiatan s/d th (n-3)(2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun (n-1) (2025)	Perkiraan realisasi capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target renja PO (n-2)	Realisasi renja PO (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) (2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
	2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya								
		Jumlah Gedung kantor dan gedung lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	2	2	2	2	100	2	2	100
3	25	03								
		Program Pengelolaan perikanan Tangkap								
		Produksi perikanan tangkap nelayan kecil (ton)	1610	1.459,80	1.530,00	1.531,10	100	1.610	1.610	100
3	25	03	2.02							
		Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/Kota								
		Produksi perikanan tangkap laut (ton)	1565	1.425,40	1.487,00	1.487,30	100	1.565	1.565	100
	2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil								
		Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya (orang)	70	50	60	60	100	70	70	100
	2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil								
		Jumlah kelompok nelayan kecil yang fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya (kelompok)	1	1	1	1	100	1	1	100
3	25	04								
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya								
		Produksi perikanan budidaya (ton)	645,0	623,7	630,0	637,6	101,2	645,0	645,0	100
3	25	04	2.02							
		Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan kecil								
		Meningkatnya kompetensi pelaku usaha perikanan (%)	88	83	85	85	100	88	88	100
	2.02.03	Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan								
		Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses iptek serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (kelompok)	35	25	30	30	100	35	35	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja Program(oucome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2025 (n-1)	Realisasi Target Kinerja hsl Program dan keluaran Kegiatan s/d th (n-3)(2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun (n-1) (2025)	Perkiraan realisasi capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target renja PD (n-2)	Realisasi renja PD (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) (2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/8)
3 25 04	2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan								
		Luasan lahan budidaya perikanan (Ha)	36,5	35,5	36,0	36,0	100,0	36,5	36,5	100,0
	2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten /Kota								
		Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (stu) daerah kabupaten/Kota (unit)	20	20	20	20	100	20	20	100,0
	2.04.03	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota								
		Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota (unit/rekor)	1.050.000,0	880.000	970.000	970.000	100	1.050.000	1.050.000	100,0
	2.04.04	Pengelolaan Kesehatan ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu)daerah Kabupaten Kota								
		Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan (dokumen)	1	1	1	1	100	1	1	100
3 25 06		Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan								
		Angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	55,7	53,6	55,7	55,7	100	55,7	55,7	100,0
3 25 06	2.02	Pembinaan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil								
		Jumlah produk perikanan yang aman dikonsumsi (%)	80	73	75	75	100	80	80	100,0
	2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil								

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD Tahun 2025 (n-1)	Realisasi Target Kinerja hsl Program dan keluaran Kegiatan s/d th (n-3)(2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun (n-1) (2025)	Perkiraan realisasi capaian Target Renstra PO s/d Tahun berjalan	
					Target renja PD (n-2)	Realisasi renja PD (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) (2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+8)	11=(10/4)
		Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perijinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko (unit usaha)	20	15	18	18	100	20	20	100,0
3	25	06	2.03	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota						
		Jumlah ketersediaan ikan (ton)	37.000,0	35.525,0	36.000,0	36.000,0	100	37.000,0	37.000,0	100,0
		2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota								
		Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (ton)	37.000,0	35.525,0	36.000,0	36.000,0	100	37.000,0	37.000,0	100,0
		2.03.02 Pemberian fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kab/Kota								
		Jumlah pelaku usaha perikanan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi (pelaku usaha)	7	6	7	7	100	7	7	100,0
		TOTAL								

Tabel 2.2

**Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Sampai dengan tahun 2024**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	TARGET KINERJA RENSTRA TAHUN					REALISASI KINERJA		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan / Meningkatnya Ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	96,8	88,7	88,8	93,6	93,61	83,1	88,7	90,92
		Skor Pola pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	95,2	95,7	96,2	96,22	96,25	95,45	96,08	96,21
2	Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Perikanan / Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	2.006	2.080	2.160	2.255	2.304	2010,1	2.083,5	2.168,7

Tabel 2.3

**Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Sampai Tahun 2024**

No	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET KINERJA RENSTRA TAHUN					Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024
	Urusan Pangan									
1	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/jiwa	135	135,59	135,82	136,06	297	361,19	369,21	296,09
2	Ketersediaan Energi	Kkal/kpt/hr	3.948	3.958	3.958	3.978	3.9789	3.957	3.958	3.969
3	Ketersediaan Protein	Gr/kpt/hr	172,87	173,3	173,73	174,16	175,25	172,87	173,3	175,1
4	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	%	100	100	100	100	100	85	87	90
5	Skor Pola pangan Harapan (SDGs)	%	96,8	88,7	91,1	93,6	93,61	83,1	87,7	90,92
	Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan									
6	Produksi Perikanan (Tangkap)	Ton	1.391	1.460	1.530	1.610	1.644	1.393,4	1.459,8	1531,1
7	Produksi	Ton	615	620	630	645	660	616,7	623,7	637,4

	Perikanan (Budidaya)									
8	Angka Konsumsi Ikan	Kg/kpt/th	36,7	37,5	38	39	57,95	41,82	53,58	Belum ada data
9	Cakupan Bina Kelompok Bina Kelompok Nelayan	%	100	100	100	30	100	25	25	27
10	Cakupan bantuan kelompok nelayan	%	18,5	18,5	18,5	5	18,5	1	6	-
11	Cakupan bina kelompok pembudidayaan ikan	%	12,5	55	57	59	61	55	57	61
12	Cakupan bantuan kelompok, kelompok pembudidaya perikanan	%	100	5	5	5	5	5	7	4
13	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	1.353	1.420	1.487	1.565	1.596	1.354	1.425,4	1.487,3
14	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam Batasan biologis aman	Ton dan %	1.353	1.420	1.487	1.565	1,23	1.354	1.425,4	1.487,3

Catatan: mulai RENSTRA periode 2025-2029 satuan proporsi tangkapan ikan yang berada dalam Batasan Biologis aman adalah %

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Ketahanan pangan Kota Denpasar

a. Tingkat Kinerja Pelayanan dan Hal Kritis yang terkait Pelayanan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

1) Bidang Perikanan

Dibidang Perikanan program Pengelolaan perikanan tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan semua untuk menunjang pencapaian target Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Perikanan dengan cara meningkatkan intensifikasi, diversifikasi dengan memperluas dan atau menambah unit usaha budidaya serta dengan meningkatkan teknologi dan inovasi unit usaha budidaya. Permasalahan mendesak adalah upaya mengoptimalkan potensi perikanan

budidaya (budidaya di lahan sempit), pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan, penguatan modal, pemasaran dan peningkatan mutu perikanan serta penyediaan benih/induk unggul serta modernisasi sarana dan prasarana perikanan budidaya maupun tangkap. Disamping permasalahan tersebut juga upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan pendapatan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengelolaan hasil perikanan dan masyarakat pesisir lainnya.

2) Pangan

Sektor Pangan merupakan salah satu fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pangan diharapkan dapat mendukung ketahanan sosial, stabilitas politik dan keamanan serta ketahanan nasional. Dalam mewujudkan ketahanan pangan, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengembangan tata laksana dengan mengedepankan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan dan keamanan pangan, akses keterjangkauan pangan serta distribusi dan diversifikasi pangan (beraneka ragam). Isu penting yang perlu dilaksanakan untuk peningkatan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga adalah memaksimalkan pemanfaatan pekarangan rumah tangga dengan membentuk kelompok-kelompok urban farming yang sangat sesuai untuk daerah perkotaan.

b. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan yang ada sehingga akan berpengaruh terhadap sasaran dinas (Meningkatnya Produksi Perikanan). Masih memungkinkan dimanfaatkan untuk peningkatan produksi.
 - 2) Belum seimbang pola konsumsi pangan yang mengakibatkan Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) rendah. Ketersediaan pangan di Kota Denpasar sudah mencukupi dilihat dari Skor PPH Ketersediaan yang cukup tinggi, diperlukan sosialisasi/edukasi dimasyarakat untuk pola konsumsi yang beragam bergizi seimbang dan aman untuk tercapainya konsumsi yang beragam yang bisa dilihat dari Skor PPH konsumsi untuk mewujudkan ketahanan pangan.
- ### c. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)
- 1) Memacu masyarakat untuk lebih meningkatkan kreatifitas di bidang perikanan dan pangan berwawasan budaya dan menjaga keseimbangan menuju keharmonisan.
 - 2) Meningkatkan kreatifitas di bidang perikanan dan pangan dengan mempercepat pertumbuhan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui system ekonomi kerakyatan.

Dibidang Perikanan program peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap melalui ekstensifikasi, diversifikasi dengan memperluas dan atau menambah unit usaha budidaya serta intensifikasi dengan meningkatkan teknologi dan inovasi unit usaha budidaya. Di bidang pangan memanfaatkan pekarangan ditingkat rumah tangga untuk pemenuhan ketahanan pangan ditingkat keluarga/rumah tangga.

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

1) Tantangan

Terbatasnya pemilikan lahan pembudidaya ikan akibat alih fungsi lahan, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan teknis SDM, menurunnya minat generasi muda bekerja di sector perikanan dan persaingan global

2) Peluang

Kota Denpasar sebagai pasar potensial produk perikanan dan pangan lainnya, masih adanya kelembagaan kelompok petani ikan dan nelayan, peluang ditumbuhkan kelompok-kelompok urban farming untuk pemenuhan pangan ditingkat rumah tangga, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang perikanan. Potensi ini bisa menjadi peluang untuk peningkatan usaha perikanan, peningkatan kualitas produk perikanan, peningkatan pengembangan agribisnis bidang perikanan.

e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

1) Meningkatkan intensifikasi usaha perikanan dengan meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mengoptimalkan usaha budidaya ikan di lahan sempit.

2) Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja OPD disusun setiap tahun sebagai penjabaran dari renstra OPD yang berlaku (lia) tahun. Di dalam RENJA disusun Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berikutnya yang tetap mengacu pada Program, kegiatan dan sub kkegiatan yang tersusun dalam Renstra Dinas. Dalam Ranwal Renja 2026 terdapat 7 Program, 15 Kegiatan dan 34 Sub kegiatan. Penyempurnaan Ranwal Renja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan ada pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN karena ada penyesuaian pada Rekening belanja PPH. Untuk Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026 disajikan pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026
Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas Perikanan dan Ketahanan pangan				17.325.587.577	Dinas Perikanan dan Ketahanan pangan				18.217.431.570	
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat				362.322.000	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat				355.200.500	
			Ketersediaan energi	3988				Ketersediaan energi	3988		
			Ketersediaan protein	174,6				Ketersediaan protein	174,6		
			Konsumsi energi	2100,0				Konsumsi energi	2100,0		
			Konsumsi protein	57,0				Konsumsi protein	57,0		
	Penyediaan dan Penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan				158.372.000	Penyediaan dan Penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan				156.280.500	
			Koefisien keragaman (CV) $\leq 15\%$	$\leq 10\%$				Koefisien keragaman (CV) $\leq 15\%$	$\leq 10\%$		
0007	Peningkatan ketahanan pangan keluarga				47.495.500	Peningkatan ketahanan pangan keluarga				50.512.500	
			Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga (keluarga)	200				Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga (keluarga)	200		
0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/Kota				77.901.000	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/Kota				80.334.000	
			Jumlah kelembagaan distribusi pangan yang dikembangkan (unit)	2				Jumlah kelembagaan distribusi pangan yang dikembangkan (unit)	2		
0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota				15.259.000	Penyediaan Informasi Harga Pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota				11.312.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Informasi harga pangantingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota (laporan)	1				Informasi harga pangantingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota (laporan)	1		
0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan pokok strategis				17.715.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan pokok strategis				14.102.000	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Stok, pasokan dan Harga pangan pokok strategis(dokumen)	1				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Stok, pasokan dan Harga pangan pokok strategis(dokumen)	1		
	Pelaksanaan Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai denan angka kecukupan gizi				203.950.000	Pelaksanaan Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai denan angka kecukupan gizi				198.920.000	
			Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam (B2SA) (desa kelurahan)	43				Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam (B2SA) (desa kelurahan)	43		
0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi pangan Per Kapita per Tahun				-	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi pangan Per Kapita per Tahun				-	
			Target konsumsi pangan perkapita/tahun	1				Target konsumsi pangan perkapita/tahun	1		
0002	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal				203.950.000	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal				198.920.000	
			Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal (laporan)	1				Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal (laporan)	1		
	Program Penanganan Kerawanan pangan				193.959.000	Program Penanganan Kerawanan pangan				254.689.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase cadangan pangan (%)	100				Persentase cadangan pangan (%)	100		
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				15.718.500	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				8.198.000	
			Tersusunnya peta daerah ketahanan dan kerentanan pangan (dokumen)					Tersusunnya peta daerah ketahanan dan kerentanan pangan (dokumen)			
0001	Penyusunan, Pemutahiran, dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan				15.718.500	Penyusunan, Pemutahiran, dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan				8.198.000	
			Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan (dokumen)	6				Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan (dokumen)	6		
	Penanganan Kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota				178.240.500	Penanganan Kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota				246.291.000	
			Pemantauan daerah rawan pangan (Kecamatan)	4				Pemantauan daerah rawan pangan (Kecamatan)	4		
0002	Pelaksanaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				169.559.000	Pelaksanaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				241.117.000	
			Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kab/kota (dokumen)	1				Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kab/kota (dokumen)	1		
0003	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				8.681.500	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				5.174.000	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (laporan)	1				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (laporan)	1		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pengawasan Keamanan Pangan				78.744.592	Program Pengawasan Keamanan Pangan				74.345.400	
			Persentase pangan yang aman dikonsumsi	95				Persentase pangan yang aman dikonsumsi	95		
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan pangan Segar daerah kabupaten/Kota				78.744.592	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan pangan Segar daerah kabupaten/Kota				74.345.400	
			Jumlah sosialisasi keamanan pangan (kali)	80				Jumlah sosialisasi keamanan pangan (kali)	80		
0004	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				26.448.500	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				23.941.900	
			Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (dokumen)	1				Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (dokumen)	1		
0007	Penyediaan Sarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				52.296.092	Penyediaan Sarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				50.403.500	
			Jumlah sarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten / Kota (dokumen)	1				Jumlah sarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten / Kota (dokumen)	1		
	Program Penunjang Urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota				14.825.357.440	Program Penunjang Urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota				15.683.637.220	
			Persentase pemenuhan penunjang layanan kesekretariatan (%)	100				Persentase pemenuhan penunjang layanan kesekretariatan (%)	100		
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah				12.625.019.400	Administrasi Keuangan Perangkat daerah				13.066.926.600	
			Jumlah pemenuhan gaji dan tunjangan pegawai (bulan)	14				Jumlah pemenuhan gaji dan tunjangan pegawai (bulan)	14		
0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN				12.625.019.400	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN				13.066.926.600	
			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	48				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	48		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat daerah				219.323.000	Administrasi Umum Perangkat daerah				244.267.000	
			Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100				Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100		
0003	Penyediaan Peralatan Rumah tangga				172.933.000	Penyediaan Peralatan Rumah tangga				192.416.000	
			Jumlah paket peralatan rumah tangga yang	3				Jumlah paket peralatan rumah tangga yang	3		
0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				46.390.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				51.851.000	
			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	1				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	1		
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				379.784.000	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				565.401.000	
			Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (unit)	18				Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (unit)	18		
0005	Pengadaan mebel				13.400.000	Pengadaan mebel				12.328.000	
			Jumlah paket mebel yang disediakan (unit)	12				Jumlah paket mebel yang disediakan (unit)	12		
0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya				366.384.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya				553.073.000	
			Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	6				Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	6		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah				1.064.321.840	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah				1.219.634.620	
			Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100				Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50.411.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				135.516.000	
			Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	1				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	1		
0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik				174.600.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik				214.200.000	
			Jumlah laporan penyediaan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik yang disediakan (laporan)	1				Jumlah laporan penyediaan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik yang disediakan (laporan)	1		
0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				27.202.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				28.757.000	
			Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan	1				Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1		
0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor				812.108.840	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor				841.161.620	
			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	1				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	1		
	Pemeliharaan barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				536.909.200	Pemeliharaan barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				587.408.000	
			Persentase barang milik daerah yang terawat (%)	100				Persentase barang milik daerah yang terawat (%)	100		
0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				301.518.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				352.158.000	
			Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	22				Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	22		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya				48.830.000	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya				48.674.000	
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	56				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	56		
0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya				186.561.200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya				186.576.000	
			Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	2				Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	2		
	Program Pengelolaan perikanan Tangkap				540.325.545	Program Pengelolaan perikanan Tangkap				548.933.000	
			Produksi perikanan tangkap nelayan kecil	1694				Produksi perikanan tangkap nelayan kecil	1694		
	Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/Kota				540.325.545	Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/Kota				548.933.000	
			Produksi perikanan tangkap laut (ton)	1644				Produksi perikanan tangkap laut (ton)	1644		
0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				272.236.675	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				272.102.000	
			Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya (orang)	80				Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya (orang)	80		
0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				204.589.370	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				213.246.000	
			Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya (kelompok)	1				Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya (kelompok)	1		
0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan skala kecil				63.499.500	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan skala kecil				63.585.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil (unit)	1				Jumlah sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil (unit)	1		
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			100	652.344.500	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			100	636.615.700	
			Produksi perikanan budidaya (ton)	660				Produksi perikanan budidaya (ton)	660		
	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan kecil				178.297.000	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan kecil				163.206.000	
			Meningkatnya kompetensi pelaku usaha perikanan (%)					Meningkatnya kompetensi pelaku usaha perikanan (%)			
0002	Pelaksanaan Fasilitas pembenihan dan pengembangan kelembagaan pembudidayaan ikan kecil				87.890.000	Pelaksanaan Fasilitas pembenihan dan pengembangan kelembagaan pembudidayaan ikan kecil				70.372.000	
			Jumlah kelompok pembudidayaan ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan (kelompok)	2				Jumlah kelompok pembudidayaan ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan (kelompok)	2		
0004	Pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan				90.407.000	Pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan				92.834.000	
			Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (kelompok)	40				Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (kelompok)	40		
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				474.047.500	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				473.409.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Luasan lahan budidaya perikanan (Ha)	37,0				Luasan lahan budidaya perikanan (Ha)	37,0		
0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten /Kota				232.691.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten /Kota				228.976.800	
			Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah	20				Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah	20		
0003	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota				186.596.500	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota				189.668.200	
			Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten /Kota (unit / ekor)	1200000				Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten /Kota (unit / ekor)	1200000		
0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu)daerah Kabupaten Kota				54.760.000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu)daerah Kabupaten Kota				54.764.700	
			Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan (dokumen)	1				Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan (dokumen)	1		
	Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan				672.544.500	Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan				664.210.750	
			Angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	58,0				Angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	58,0		
	Pembinaan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				251.450.000	Pembinaan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				251.449.750	
			Jumlah produk perikanan yang aman dikonsumsi (%)	80				Jumlah produk perikanan yang aman dikonsumsi (%)	80		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0002	Pembinaan terhadap penerapan persyaratan perijinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala dan risiko				251.450.000	Pembinaan terhadap penerapan persyaratan perijinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala dan risiko				251.449.750	
			Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perijinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko (unit usaha)	20				Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perijinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko (unit usaha)	20		
	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota				421.094.500	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota				412.761.000	
			Jumlah Ketersediaan ikan (ton)	37000				Jumlah Ketersediaan ikan (ton)	37000		
0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota				324.170.000	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota				321.093.000	
			Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kab/Kota	37000				Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kab/Kota	37000		
0002	Pemberian fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten / Kota				96.924.500	Pemberian fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten / Kota				91.668.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi	7				Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi	7		
	TOTAL				17.325.597.377	TOTAL				18.217.431.570	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk usulan Program dan Kegiatan tahun 2026 sebagian besar merupakan usulan masyarakat (kelompok) dengan mengajukan proposal kepada Walikota Denpasar melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan pangan yang ditangani oleh bidang teknis. Untuk usulan tahun 2026 tidak ada usulan masyarakat melalui Musrenbang maupun usulan E Pokir.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN
DAN KETAHANAN PANGAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan yang dimaksud adalah penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan. Arah kebijakan umum pembangunan nasional 2020-2024 terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan adalah: 1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan; 2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan. Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antar sektor dan antar wilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya. Arah kebijakan RPJMD tahun 2021-2026 Kota Denpasar merupakan pencapaian lebih nyata dari strategi yang dipilih dan merupakan Akselerasi dari penjabaran visi dan misi Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan sasaran Rencana Jangka Menengah Pembangunan Nasional serta pencapaian sasaran Sustainable Development Goals (SDGS).

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar memiliki arah kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran:

- Sasaran 1. Meningkatnya Ketahanan Pangan dengan arah kebijakan : Menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan, Menjamin keamanan pangan masyarakat, Menjamin keamanan akses dan distribusi pangan dan Meningkatkan pembinaan pola konsumsi dan kewaspadaan pangan.
- Sasaran 2. Meningkatnya Produksi Perikanan dengan arah kebijakan : Mengoptimalkan produksi perikanan untuk ketahanan pangan, Mendorong penguatan kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah perikanan, Sosialisasi gemarikan dan Meningkatkan pelayanan perikanan dan pengawasan yang ketatterhadap produk hasil perikanan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Sesuai dengan RKPD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2026 yang mengangkat Tema“ Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan PeningkatanKualitas SDM untuk Pertumbuhan yang Berkualitas”dengan 5 prioritas Pembangunan daerah tahun 2026 sebagai berikut :

- 1. Pendidikan dan Kesehatan
- 2. EkonomiKreatif, Pariwisata dan Kebudayaan
- 3. Sosial dan Ketenagakerjaan
- 4. Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan
- 5. Reformasi Birokrasi

Adapun tujuan Renja sesuai program dan kegiatan tahun 2026 adalah :

- 1. Mewujudkan Ketahanan Pangan
- 2. Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Perikanan

Sasaran Renja sesuai dengan program dan kegiatan tahun 2026 adalah :

- 1. Meningkatnya Ketahanan Pangan
- 2. Meningkatnya Produksi Perikanan

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perikanan dan Ketahanan pangan Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar

No	Tujuan / Sasaran	IndikatorTujuan / Sasaran	Target 2026
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan / Meningkatnya Ketahanan pangan	- Skor Pola pangan Harapan (PPH) Konsumsi	93,61
		- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	96,25
2	Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Perikanan / Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	2.304

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2026 sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan dapat dilaksanakan melalui program dan kegiatan meliputi : Jumlah program 7, jumlah kegiatan 15 dengan 34 Sub Kegiatan dengan penyebaran lokasi program dan kegiatan pada 4 (empat) Kecamatan di wilayah Kota Denpasar. Total keseluruhan dana yang direncanakan sebesar Rp. 16.553.412.074,-. Dengan pagu indikatif untuk belanja Operasi 16.343.396.074,- dan belanja modal Rp. 210.016.000,-

Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2026 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel.3.2.

Tabel 3.2
Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan maju Tahun 2027
Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan maju rencana tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1					2	4	5	6	7	8	9	10	11
3,25					Dinas Perikanan dan Ketahanan pangan				14.353.412.074				16.952.737.660
2,09	03				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat				354.109.500				387.368.612
						Ketersediaan energi (Kkal/kapita/hari)		3970				3971	
						Ketersediaan protein (gram/kapita/hari)		175,20				175,25	
						Konsumsi energi (Kkal/kapita/hari)		2100,0				2.100,00	
						Konsumsi protein (gram/kapita/hari)		57,0				57,00	
2,09	03		2	01	Penyediaan dan Penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan				155.189.500				261.151.553
						Koefisien keragaman (CV) ≤ 15%		≤ 10%				≤ 10%	
2,09	03		2	01	0007 Peningkatan ketahanan pangan keluarga				50.532.500				65.000.000
						Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga		150				150	
2,09	03		2	01	0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/Kota				79.593.000				80.000.000
						Jumlah kelembagaan distribusi pangan (unit)		1				1	
2,09	03		2	01	0012 Penyediaan informasi Harga Pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota				10.962.000				23.001.265
						Informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota (laporan)		12				12	

Kode	Urusan/Sidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan maju rencana tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
2,09 03	2 01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan pokok strategis		14.102.000				93.150.288
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Stok pangan, pasokan pangan dan Harga pangan pokok strategis(laporan)	12				12	
2,09 03	2 04		Pelaksanaan Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi		198.920.000				126.217.059
			Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam (B2SA) (desa kelurahan)	43				43	
2,09 03	2 04	0002	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal		198.920.000				126.217.059
			Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal (laporan)	1				1	
2,09 04			Program Penanganan Kerawanan pangan		253.398.000				203.751.208
			Persentase cadangan pangan (%)	100				100	
2,09 04	2 01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		8.198.000				28.751.208
			Peta daerah ketahanan dan kerentanan pangan (dokumen)	1				1	
2,09 04	2 01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran, dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		8.198.000				28.751.208
			Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan (dokumen)	1				1	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan majo rencana tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1					2	4	5	6	7	8	9	10	11
2,09	04		2	02		Penanganan Kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota			245.200.000				175.000.000
						Jumlah Pemantauan daerah rawan pangan (Kecamatan)		4				4	
2,09	04		2	02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			240.551.000				175.000.000
						Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kab/Kota (dokumen)		1				1	
2,09	04		2	02	0003	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota			4.649.000				8.750.000
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (laporan)		1				12	
2,09	05					Program Pengawasan Keamanan Pangan			74.345.400				122.000.000
						Persentase pangan yang aman dikonsumsi (%)		93				93	
2,09	05		2	01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan pangan Segar daerah kabupaten/Kota			74.345.400				122.000.000
						Jumlah sosialisasi keamanan pangan (kali)		60				60	
2,09	05		2	01	0004	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota			23.941.900				27.000.000
						Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (dokumen)		10				10	
2,09	05		2	01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			50.403.500				95.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan maju rencana tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah sarana: pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten / Kota (dokumen)		1				1	
3,25 01		Program Penunjang Urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota			14.209.995.474				14.550.708.840
		Persentase pemenuhan penunjang layanan kesekretariatan (%)	Denpasar	100				100	
3,25 01	2 02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah			12.348.713.494				12.700.000.000
		Jumlah pemenuhan gaji dan tunjangan ASN (bulan)		14				14	
3,25 01	2 02 0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN			12.348.713.494				12.700.000.000
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/ bulan)		67				70	-
3,25 01	2 06	Administrasi Umum Perangkat daerah			243.511.000				230.000.000
		Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah (%)		100				100	
3,25 01	2 06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah tangga			190.400.000				180.000.000
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)		2				2	
3,25 01	2 06 0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			53.111.000				50.000.000
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)		1				1	
3,25 01	2 07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			210.016.000				250.000.000
		Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (unit)		38				18	
3,25 01	2 07 0005	Pengadaan mebel			-				50.000.000
		Jumlah paket mebel yang disediakan (unit)		12				12	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kelatan	INDIKATOR KINERJA Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan majo rencana tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1					2	4	5	6	7	8	9	10	11
3,25	01		2	07	0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya			210.016.000				250.000.000
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)		6				8	
3,25	01		2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah			905.690.980				1.036.708.840
						Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)		100				100	
3,25	01		2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			97.744.000				50.000.000
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)		1				1	
3,25	01		2	08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik			214.200.000				174.600.000
						Jumlah laporan penyediaan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan (laporan)		1				1	
3,25	01		2	08	0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			28.757.000				30.000.000
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan(laporan)		1				1	
3,25	01		2	08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor			564.989.980				812.108.840
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)		1				1	
3,25	01		2	09		Pemeliharaan barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			502.064.000				334.000.000
						Persentase barang milik daerah yang terawat (%)		100				100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan maju rencana tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1					2	4	5	6	7	8	9	10	11
3,25	01		2	09	0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			352.158.000				250.000.000
						Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)		22				22	
3,25	01		2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya			48.674.000				55.000.000
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)		56				73	
3,25	01		2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya			101.232.000				84.000.000
						Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)		2				2	
3,25	03					Program Pengelolaan perikanan Tangkap			489.814.000				450.000.000
						Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton)		1644				1678	
3,25	03		2	02		Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/Kota			489.814.000				
						Jumlah Produksi perikanan tangkap laut (ton)		1596				1628	
3,25	03		2	02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			260.972.000				150.000.000
						Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya (orang)		30				30	
3,25	03		2	02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil			165.782.000				150.000.000
						Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya (kelompok)		1				1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kelatan	INDIKATOR KINERJA Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan maju rencana tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
3,25 03	2 02	0004			63.060.000				150.000.000
				Jumlah sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil (unit)	30			30	
3,25 04		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		100	562.936.700			100	812.322.000
				Jumlah Produksi perikanan budidaya (ton)	660			674	
3,25 04	2 02	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan kecil			104.708.800				196.126.000
				Persentase pelaku usaha yang meningkat kompetensinya (%)	90,00			90,50	
3,25 04	2 02	0002			80.572.000				96.679.000
				Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan (kelompok)	1			1	
3,25 04	2 02	0004			24.136.800				99.447.000
				Pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan					
				Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (kelompok)	30			30	
3,25 04	2 04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dengasar		458.227.900	APBD			616.196.000
				Luasan lahan budidaya perikanan (Ha)	37,0			37,1	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan maju rencana tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1					2	4	5	6	7	8	9	10	11
3,25	04		2	04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten /Kota			213.795.000				255.960.000
						Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota (unit)		20				25	
3,25	04		2	04	0009	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	UPTD		54.764.700				300.000.000
						Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan (dokumen)		1				1225000	
3,25	04		2	04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu)daerah Kabupaten Kota			189.668.200				60.236.000
						Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten /Kota (unit)		1200000				1	
3,25	06					Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan			608.813.000				426.587.000
						Angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)		57,95				59,13	
3,25	06		2	02		Pembinaan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			251.091.000				-
						Persentase produk perikanan yang aman dikonsumsi (%)		88,5				89,00	
3,25	06		2	02	0002	Pembinaan terhadap penerapan persyaratan perijinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala dan risiko			251.091.000				-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan mjd rencana tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perijinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko (unit usaha)		15				15	
3,25.06	2.03	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota			357.722.000				426.587.000
		Jumlah Ketersediaan ikan (ton)		37.100				37.150	
3,25.06	2.03	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota			320.743.000				356.587.000
		Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kab/Kota (ton)		37.100				37.150	
	2.03	Pemberian fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten / Kota			36.979.000				70.000.000
		Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota yang terfasilitasi		25				25	
		TOTAL			16.553.412.074				16.952.737.660

Keterangan : Indikator dan target mengacu pada Rancangan Akhir Renstra 2025-2029

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN
DAN KETAHANAN PANGAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai indikator kinerja dari masing-masing sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan strategi dan arah kebijakan, maka diperlukan adanya kebijakan umum sebagai landasan dalam menyusun program pembangunan daerah. Kebijakan umum Pembangunan Kota Denpasar disusun sesuai dengan prioritas pengembangan sector pembangunan Perikanan dan Ketahanan Pangan untuk mencapai sasaran Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan yaitu Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Meningkatnya Produksi Perikanan. Untuk mencapai sasaran yang sudah tercantum pada RENSTRA Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, setiap tahun disusun Rencana Kerja Dinas yang menyajikan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan dana/pagu indikatif.

Adapun penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel 4.1 tentang Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan pendanaan.

TABEL 4.1
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA Program/Kegiatan		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	4	6	7
3,25	Dinas Perikanan dan Ketahanan pangan			16.553.412.074
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat			354.108.500
		Ketersediaan energi masyarakat (Kkal/kapita/hari)	3970	
		Ketersediaan protein(gram/kapita/hari)	175,20	
		Konsumsi energi (Kkal/kapita/hari)	2100,0	
		Konsumsi protein (gram/kapita/hari)	57,0	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan			155.189.500
		Koefisien keragaman (CV) ≤ 15%	≤ 10%	
2.09.03.2.01.0007	Peningkatan ketahanan pangan keluarga			50.532.500
		Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga (keluarga)	150	
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/Kota			79.593.000
		Jumlah kelembagaan distribusi pangan (unit)	1	
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota			10.962.000
		Informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota (laporan)	12	
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan pokok strategis			14.102.000
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Stok pangan, pasokan pangan dan Harga pangan pokok strategis(laporan)	12	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi			198.920.000
		Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam (B2SA) (desa kelurahan)	43	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal			198.920.000
		Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal (laporan)	4	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kelatan	INDIKATOR KINERJA Program/Kegiatan		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	4	6	7
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan pangan			253.398.000
		Persentase cadangan pangan (%)	100	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			8.198.000
		Peta daerah ketahanan dan kerentanan pangan (dokumen)	1	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutahiran, dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			8.198.000
		Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan (dokumen)	1	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota			245.200.000
		Jumlah Pemantauan daerah rawan pangan (Kecamatan)	4	
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			240.551.000
		Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kab/kota (dokumen)	1	
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota			4.649.000
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (laporan)	1	
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan			74.345.400
		Persentase pangan yang aman dikonsumsi (%)	93	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan pangan Segar daerah kabupaten/Kota			74.345.400
		Jumlah sosialisasi keamanan pangan (kali)	60	
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota			23.941.900
		Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (dokumen)	10	
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			50.403.500
		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten / Kota (dokumen)	1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA Program/Kegiatan		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	4	6	7
3.25.01	Program Penunjang Urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota			14.209.995.474
		Persentase pemenuhan penunjang layanan kesekretariatan (%)	100	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah			12.348.713.494
		Jumlah pemenuhan gaji dan tunjangan ASN (bulan)	14	
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN			12.348.713.494
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/ bulan)	67	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah			243.511.000
		Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah tangga			190.400.000
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	2	
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			53.111.000
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	1	
3.25.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			210.016.000
		Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (unit)	18	
3.25.01.2.0.0005	Pengadaan mebel			-
		Jumlah paket mebel yang disediakan (unit)	12	
3.25.01.2.0.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya			210.016.000
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	6	
3.25.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah			905.690.980
		Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			97.744.000
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	1	
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik			214.200.000
		Jumlah laporan penyediaan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan (laporan)	1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA Program/Kegiatan		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	4	6	7
3.25.01.2.08.0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			28.757.000
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan(laporan)	1	
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor			564.989.980
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	1	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			502.064.000
		Persentase barang milik daerah yang terawat (%)	100	
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			352.158.000
		Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	22	
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya			48.674.000
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	56	
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya			101.232.000
		Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	2	
3.25.03.2.02	Program Pengelolaan perikanan Tangkap			489.814.000
		Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton)	1644	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/Kota			489.814.000
		Jumlah Produksi perikanan tangkap laut (ton)	1596	
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			260.972.000
		Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya (orang)	30	
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil			165.782.000
		Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya (kelompok)	1	
3.25.03.2.02.0004	Penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil			63.060.000
		Jumlah sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil (unit)	30	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kelatan	INDIKATOR KINERJA Program/Kegiatan		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	4	6	7
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		100	562.936.700
		Jumlah Produksi perikanan budidaya (ton)	660	
3.25.04.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan kecil			104.708.800
		Persentase pelaku usaha yang meningkat kompetensinya (%)	90,00	
3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidayaan ikan kecil			80.572.000
		Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan (kelompok)	1	
3.25.04.2.02.0004	Pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan			24.136.800
		Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (kelompok)	30	
3.25.04.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			458.227.900
		Luasan lahan budidaya perikanan (Ha)	37,0	
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten /Kota			213.795.000
		Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (unit)	20	
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu)daerah Kabupaten / Kota			54.764.700
		Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan (dokumen)	1	
3.25.04.2.04.0009	Perjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota			189.668.200
		Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten /Kota (unit)	1.200.000	
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan			608.813.000
		Angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	57,95	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			251.091.000
		Persentase produk perikanan yang aman dikonsumsi (%)	88,5	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA Program/Kegiatan		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	4	5	7
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap penerapan persyaratan perijinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko			251.091.000
		Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perijinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko (unit usaha)	15	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota			357.722.000
		Jumlah Ketersediaan Ikan (ton)	37.100	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota			320.743.000
		Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kab/Kota (ton)	37.100	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten / Kota			36.979.000
		Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota yang terfasilitasi	25	
	TOTAL			16.553.412.074

Keterangan : indikator dan target mengacu pada Rancangan Akhir Renstra 2025-2029

Sedangkan Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan pangan Kota Denpasar mengacu pada indikator kinerja daerah yang tercantum pada tabel 7.2 Renstra Dinas, dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2026

No	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2026
	Urusan Bidang Pangan		
1	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/jiwa	136,30
2	Ketersediaan Energi	Kkal/kpt/hr	3.988
3	Ketersediaan Protein	Gr/kpt/hr	174,59
4	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	%	100
5	Skor Pola pangan Harapan (SDGs)	%	96
	Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan		
6	Produksi Perikanan (Tangkap)	Ton	1.694
7	Produksi Perikanan (Budidaya)	Ton	400
8	Angka Konsumsi Ikan	Kg/kpt/th	40
9	Cakupan Bina Kelompok Bina Kelompok Nelayan	Kelompok	32
10	Cakupan bantuan kelompok nelayan	Kelompok	5
11	Cakupan bina kelompok pembudidayaan ikan	Kelompok	61
12	Cakupan bantuan kelompok, kelompok pembudidaya perikanan	Kelompok	5
13	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	1.644
14	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam Batasan biologis aman	persen	1,23

Ket. Maximum Sustainable Yield/tangkapan maksimum yang berkelanjutan) di WPPNRI 573 sebanyak 161.600 ton pertahun, Dimana perairan laut wilayah Kota Denpasar termasuk di WPPNRI 573. Batasan biologis aman : hasil tangkapan/ (80% potensi Lestari)x100 (80% x 161.600 ton = 129.300 ton.

V. PENUTUP

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2026 telah tersusun dengan harapan dipenuhinya ketersediaan anggaran sesuai kebutuhan sehingga target kinerja yang telah tersusun dalam program dan kegiatan dapat tercapai dalam upaya peningkatan pelaksanaan pembangunan dibidang perikanan dan ketahanan pangan serta pelayanan kepada masyarakat pembudidaya dan nelayan. Selanjutnya tindak lanjut dari Rencana Kerja ini dapat dipakai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2026.

Denpasar, 2 September 2025
Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kota Denpasar



drh. Ida Bagus Mayan Suryawangsa
Pembina Utama Muda
NIP. 19660328 199703 1 003

Renja Perangkat Daerah diatas menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.





ပြည်ထောင်စုအစိုးရ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
အစိုးရအဖွဲ့အစည်း

DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

ဥပဒေရေးရာနှင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်း၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်း

JL. Mataram No. 1 Denpasar, Telepon (0361) 251225, Fax. (0361) 251239

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Kota Denpasar Tahun 2026

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ada	tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2	Pengolahan data dan informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kota Denpasar tahun 2024 berdasarkan renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar.	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD Kota Denpasar Tahun 2026.	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan.		√	Tidak ada usulan saat Musrenbang Kecamatan	
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ada	tidak		
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Denpasar dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Denpasar telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	√			

Denpasar, Juli 2025

Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kota Denpasar

drh. Ida Bagus Mayun Suryawangsa

Pembina Utama Muda

NIP. 19660328 199703 1 003



ប្រតិភូ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Maruti No. 8 Denpasar Kode Pos 80115 Telepon: (0361) 413357
www.denpasarkota.go.id email: bappeda@denpasarkota.go.id

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2026

No.	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup Kota Denpasar telah berpedoman pada RKPD Kota Denpasar	Rancangan Akhir Rencana Kerja 2026 sudah berpedoman pada RKPD Kota Denpasar tahun 2026
2	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup Kota Denpasar dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Denpasar serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Rancangan Akhir Rencana Kerja tahun 2026 Perangkat Daerah sudah mengacu pada perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup Kota Denpasar dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Denpasar serta pencapaian sasaran Pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.

Denpasar, 11 Agustus 2025
Kepala Bappeda Kota Denpasar

I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST,MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199703 1 004

Petunjuk Pengisian :

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.3.3/2039/ HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2026

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tahapan awal persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025;

4. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perangkat daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:
- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2026;
 - b. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah Urusan Wajib Non dasar pangan dan urusan Pilihan Keluatan dan Perikanan.
 - c. menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2026;
 - d. mengkoordinasikan penetapan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2026; dan,
 - e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Kota Denpasar.
- KETIGA : Segala Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Nopember 2024

a.n. Walikota Denpasar,
Kepala Dinas Perikanan dan
Ketahanan Pangan Kota Denpasar



drh. Ida Bagus Mayun Suryawangsa
Pembina Utama Muda
NIP.19660328 199703 1 003

Tembusan disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Ketua Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota
Denpasar
3. Inspektur Kota Denpasar
4. Kepala Bappeda Kota Denpasar
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota
Denpasar
6. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 28 NOPEMBER 2024
NOMOR : 100.3.3.3 / 2039/ HK / 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN
DAN KETAHANAN PANGAN KOTA
DENPASAR TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026

Penasehat : 1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar

Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kota Denpasar
3. Asisten Administrasi Perekonomian dan
Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Denpasar
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Kota Denpasar

Ketua : Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota
Denpasar

Sekretaris : Sekretaris Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kota Denpasar

Anggota : 1. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
2. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
3. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan
Pembudidayaan Ikan
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Budidaya
Perikanan Air Tawar
7. Ni Wayan Miki, S.Pi sebagai Perencana Ahli Muda
8. Ni Nyoman Guna Antarini, S.P, M.Agr sebagai
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda
9. Ir. Anak Agung Sagung Mirah Uspati sebagai
Analisis Ketahanan Pangan ahli Muda

10. Maryani A. Nenohay, S.Pt, M.Si sebagai Analis
Akuakultur Ahli Muda
11. I Gusti Agung Ayu Sr Kusumayanthi, S.Pt sebagai
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli
Muda
12. Indira Saryani Staf pada Sekretariat Dinas
Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar,

a.n. Walikota Denpasar,
Kepala Dinas Perikanan dan
Ketahanan Pangan
Kota Denpasar



drh. Ida Bagus Mayun Suryawangsa
Pembina Utama Muda
NIP.19660328 199703 1 003